

KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-INDIA DITINJAU DARI KETERSEDIAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Indonesia Readiness Against ASEAN - India Free Trade Based On Availability Indonesian National Standard and Conformity Assessment Body

Febrian Isharyadi dan Bendjamin B. Louhenapessy

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Senayan, Jakarta, Indonesia
e-mail: febrianisharyadi@yahoo.co.id, bendjamin_1711@yahoo.co.id

Diterima: 3 Januari 2014, Direvisi: - , Disetujui: 19 Februari 2014

Abstrak

Perdagangan bebas ASEAN – India (AIFTA) ditandatangani tanggal 13 Agustus 2009 di Bangkok dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010. Dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN - India tersebut, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN perlu mempersiapkan diri agar produk dalam negeri memiliki daya saing terhadap produk dari negara India. Salah satu alat untuk meningkatkan daya saing produk adalah standar dan lembaga penilaian kesesuaian yang akan memastikan kesesuaian produk dengan standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia ditinjau dari ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan lembaga penilaian kesesuaian dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN-India. Metodologi yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif dengan mengidentifikasi ketersediaan SNI dan lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi yang meliputi 20 produk dengan kenaikan nilai ekspor terbesar ke India dan 20 produk dengan kenaikan nilai impor terbesar dari India sesudah pemberlakuan AIFTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ruang lingkup penelitian nilai kesiapan Indonesia ditinjau dari ketersediaan SNI dan lembaga penilaian kesesuaian secara keseluruhan adalah sebesar 20,51%

Kata kunci: SNI, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Perdagangan Bebas, ASEAN - India AIFTA.

Abstract

ASEAN - India free trade (AIFTA) signed on August 13, 2009 in Bangkok and came into effect on January 1, 2010. In the face of the ASEAN - India free trade, Indonesia as ASEAN member countries need to prepare domestic products competitiveness against products from India. One of the tools to improve the competitiveness of the products are standard and conformity assessment bodies that will ensure conformance with product standards. This study aims to determine the readiness of Indonesia in terms of the availability of the Indonesian National Standard (SNI) and conformity assessment bodies in the face of the ASEAN - India free trade. The methodology used is quantitative description by identifying the availability of SNI and accredited conformity assessment bodies which include 20 products with the greatest increase in the value of exports to India and 20 products with the greatest increase in the value of imports from India after the application of AIFTA. The results showed that the scope of the research value of the readiness of Indonesia readiness in terms of the availability of SNI and conformity assessment bodies as a whole is at 20.51 %.

Keywords: SNI, conformity assessment body, free trade, ASEAN - India AIFTA.

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, kegiatan ekonomi dunia saat ini sangat dinamis khususnya dalam hal perdagangan yang ditandai dengan semakin meningkatnya aliran barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Integrasi ekonomi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh negara-negara di dunia yang berada dalam suatu kawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran di negara atau kawasan tersebut. Kondisi ekonomi yang terintegrasi ditandai

dengan penghapusan hambatan - hambatan ekonomi antar negara (Winantyo, R., et al., 2008). Namun masing-masing negara berhak menentukan hambatan bagi negara non anggotanya (Salvatore, 2007). Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan aliran barang dan jasa menjadi relatif rendah. Integrasi ekonomi kemudian dilakukan dengan liberalisasi perdagangan antara negara yang tergabung dalam integrasi (Maharani A.K, 2013). Salah satu konsep integrasi ekonomi adalah *Free Trade Area* (FTA). Konsep FTA dapat dimaksudkan

pula untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan negara - negara yang terlibat didalamnya (Lembaga Pertahanan Nasional, 2012).

Association of South East Asian Nation (ASEAN) sebagai suatu regional yang saling terintegrasi di wilayah Asia Tenggara dalam meningkatkan kapasitas ekonomi di dunia internasional melakukan berbagai *agreement* FTA. Salah satu dari FTA tersebut adalah *ASEAN India Free Trade Area (AIFTA)*.

Perdagangan ASEAN-India cenderung meningkat, dari tahun 1995 hingga tahun 2008 ekspor India ke negara di wilayah ASEAN semakin meningkat, bahkan 10% ekspor India adalah ke negara di kawasan ASEAN (Francis, 2011). Indonesia merupakan salah satu mitra dagang utama dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari *United Nations Commodity Trade (UN Comtrade)*, perdagangan ekspor dan impor ke dan dari negara India meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2010 menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke India adalah sebesar US\$ 9.915.038.943 dan impor Indonesia dari India sebesar US\$ 3.294.762.170 (UN Comtrade, 2013)

Dalam menghadapi AIFTA tersebut, Indonesia perlu mempersiapkan diri agar produk dalam negeri dapat memiliki daya saing dengan produk yang datang dari negara India dan produk Indonesia mampu bersaing dengan produk dari negara lain yang masuk ke negara India.

Menurut Porter (2009), peningkatan daya saing memiliki sumber utama pada produktivitas dan rata-rata peningkatan produktivitas. Selain itu, langkah dalam meningkatkan daya saing yang strategis adalah penerapan standar. Banyak industri yang kehilangan daya saing produk yang dihasilkan akibat tidak diterapkannya standar (Badan Standardisasi Nasional, 2010). Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Standar tidak dapat diterapkan tanpa adanya infrastruktur teknis pendukung yang mampu membuktikan kesesuaian produk, bahwa spesifikasi teknis yang dipersyaratkan terkait dengan suatu barang dan/atau jasa, proses, sistem, perseorangan (personel) atau lembaga telah dipenuhi terhadap standar tersebut (Badan Standardisasi Nasional, 2009). Infrastruktur teknis tersebut dinamakan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Lembaga ini merupakan laboratorium uji terakreditasi yang mampu melakukan pengujian terhadap kesesuaian produk dan lembaga sertifikasi produk yang memberikan jaminan terhadap

kualitas suatu produk melalui suatu proses sertifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia ditinjau dari ketersediaan SNI dan LPK meliputi: laboratorium uji, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN) dalam rangka mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia dalam perdagangan global ASEAN INDIA Free Trade Area (AIFTA).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

AIFTA telah ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009 di Bangkok oleh seluruh perwakilan anggota ASEAN dan India. *Agreement* tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 (ASEAN, 2009). AIFTA diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara di regional Asia Tenggara dengan negara India. India merupakan mitra dagang bagi negara-negara di ASEAN.

Dalam AIFTA akan terjadi penurunan tarif untuk bea masuk produk impor dari India ke Indonesia ataupun produk ekspor dari Indonesia ke India. *Scheduling* dari penurunan tarif bea masuk tersebut sesuai dengan kategori produk yang ada dalam *agreement* AIFTA tersebut (Fukuchi, 2009).

Kategori produk dalam AIFTA dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya :

1. *Normal Track 1 (NT-1)*, pada tarif *schedule* ini untuk ASEAN 5 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) bea masuk pada akhir tahun 2013 akan berlaku 0 (nol). Sedangkan untuk Filipina dan Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV) bea masuk menjadi nol pada akhir tahun 2018.
2. *Normal Track 2 (NT-2)*, pada tarif *schedule* ini untuk ASEAN 5 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) bea masuk pada akhir tahun 2016 akan berlaku nol. Untuk Filipina bea masuk menjadi nol pada akhir tahun 2016 dan untuk Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam bea masuk menjadi nol pada akhir tahun 2021.
3. *Sensitive Track (ST)*, pada tarif *schedule* ini dibagi menjadi 3 jenis tarif *schedule* yaitu:
 - a. Tingkat tarif *Most Favored Nation (MFN)* diatas 5% akan dikurangi menjadi 5% sesuai dengan jadwal penurunan tarif. Untuk ASEAN 5 bea masuk dipotong menjadi 5% pada akhir tahun 2016. Untuk

- Filipina pada akhir tahun 2019 dan untuk Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam pada akhir tahun 2021.
- b. Tingkat tarif MFN 5% dapat dipertahankan untuk 50 pos tarif. Untuk pos tarif yang tersisa, tarif MFN dikurangi menjadi 4,5 persen pada saat mulai berlakunya AFTA untuk ASEAN 6 dan 5 tahun sejak berlakunya AFTA untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Tingkat tarif yang dikurangi menjadi empat 4% sesuai dengan tanggal akhir pemberlakuan.
 - c. Tingkat tarif MFN 4% dari pos tarif yang ditempatkan pada ST. Tarif bea masuk akan menjadi nol pada akhir tahun 2019 untuk ASEAN 5, pada akhir tahun 2022 untuk Filipina dan akhir tahun 2024 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.
4. *Highly Sensitive List* (HSL), pada tarif *schedule* ini tariff bea masuk akan berkurang sebesar 50% dari tariff MFN pada akhir tahun 2019 untuk ASEAN 5 dan Filipina, sedangkan untuk negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam berkurang sebanyak 25% dari tarif MFN.
 5. *Exclusion List* (EL), pada tarif *schedule* ini dikenakan peninjauan tarif tahunan dengan maksud untuk meningkatkan akses pasar.

2.2 Standardisasi

Standar merupakan alat penting dalam memproduksi atau membuat suatu produk. Berdasarkan pengertian ISO/IEC Guide 2:2004, standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan

datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dan ditetapkan oleh BSN.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang diperoleh dari pengolahan beberapa data sekunder yaitu data ekspor dan impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 sebagai data yang mewakili sebelum pemberlakuan AFTA dan data ekspor dan impor tahun 2010 sebagai data yang mewakili sesudah pemberlakuan AFTA. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah 20 besar produk prioritas yang mempunyai kenaikan nilai ekspor dan impor ke dan dari negara India antara sebelum dan sesudah pemberlakuan AFTA.

Data dari 20 besar produk prioritas yang mempunyai kenaikan nilai ekspor dan impor ke dan dari negara India sesudah pemberlakuan AFTA tersebut disandingkan dengan data SNI dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) per tanggal 19 April 2012 untuk melihat ketersediaan SNI. Selain itu, data 20 besar produk prioritas disandingkan pula dengan data laboratorium uji lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi di Indonesia dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) per tanggal 6 Februari 2013 untuk mengetahui ketersediaan dari lembaga penilaian kesesuaian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perolehan data ekspor dan impor ke dan dari India (Tabel 1 dan 2) adalah 20 produk prioritas dengan *Harmonized System* (HS) 10 digit yang memiliki kenaikan nilai ekspor dan impor antara sebelum dan sesudah pemberlakuan AFTA.

Tabel 1 Dua puluh produk prioritas ekspor Indonesia ke India.

No	Nomor HS	Deskripsi Produk	Nilai Kenaikan Ekspor (US\$)	Tarif Schedule
1	1511100000	Minyak kelapa sawit mentah (CPO)	1,017,797,703	NT-1
2	2603000000	Bijih tembaga dan konsentratnya	337,466,046	NT-1
3	4001222000	TSNR 20, karet alam dalam bentuk lain	143,710,014	NT-1
4	8462101000	Mesin penempa (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu (elektrik)	77,847,825	NT-1
5	1513210000	Minyak kernel kelapa sawit atau babassu mentah	70,823,906	NT-1
6	4703290000	Pulp kayu kimia dari pohon bukan jenis konifera	60,406,259	NT-1
7	3002201000	Toksoid tetanus (vaksin untuk obat manusia)	35,504,221	NT-1
8	5512190000	Kain tenunan dari serat stapel sintetik	23,955,123	ST
9	2902200000	Benzena	22,147,774	NT-1

No	Nomor HS	Deskripsi Produk	Nilai Kenaikan Ekspor (US\$)	Tarif Schedule
10	2902430000	P-silena	21,813,142	NT-1
11	8540110000	Tabung gambar televisi sinar katoda (berwarna)	18,782,948	NT-1
12	4001211000	Karet alam dalam smoked sheets, RSS grade 1	18,306,356	NT-1
13	5504100000	Serat stapel tiruan, untuk dipintal dari rayon viskosa	16,932,026	NT-2
14	3105510000	Pupuk mineral atau kimia lainnya mengandung nitrat dan fosfat	14,425,562	NT-1
15	2916120000	Ester dari asam akrilik	12,120,112	NT-1
16	3102100000	Urea dalam larutan air maupun tidak	10,947,891	NT-1
17	3806100000	Asam rosin dan asam damar (resin)	10,214,210	NT-1
18	3201901000	Gambir	9,676,021	NT-1
19	4409290000	Kayu (untuk lantai papan) dari pohon bukan jenis konifera selain bambu	9,218,605	NT-1
20	2915902000	Asam laurat, asam miristat, garam dan esternya	8,418,203	NT-1

Keterangan : NT-1 = *Normal Track 1* ; ST = *Sensitive Track*
 NT-2 = *Normal Track 2*

Catatan : Dua puluh produk prioritas ekspor Indonesia ke India berdasarkan produk yang mengalami kenaikan ekspor sesudah pemberlakuan AFTA (urutan berdasarkan kenaikan tertinggi hingga terendah)

Tabel 2 Dua puluh produk prioritas impor Indonesia dari India.

No	Nomor HS	Deskripsi Produk	Nilai Kenaikan Impor (US\$)	Tarif Schedule
1	5201000000	Kapas, tidak digaruk atau disisir	67,654,750	NT-1
2	2902430000	p-silena	56,595,808	NT-1
3	1202109000	Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain,berkulit	36,330,558	HSL
4	1701110010	Gula tebu, dengan warna larutan (ICUMSA) minimal 1200	35,529,303	EL
5	2901240000	Buta-1,3-diena dan isoprena	25,954,339	NT-1
6	2902410000	O-silena	24,666,989	NT-1
7	1005909000	Jagung, selain benih dan jagung brondong	20,844,835	EL
8	3902102000	Polipropilena dalam bentuk granul (butiran)	17,866,694	HSL
9	1202200000	Kacang tanah dikuliti, pecah maupun tidak	13,600,522	HSL
10	2905310000	Etilena glikol (ethanadiol)	11,606,134	NT-1
11	2401201000	Tembakau jenis Virginia, diolah dengan udara panas	11,504,061	NT-1
12	5503200000	Serat stapel sintetik, untuk dipintal dari poliester	11,493,988	ST
13	7219130000	Produk canai lantainya dari baja stainless	10,860,131	NT-1
14	8407320000	Mesin piston bolak-balik dari jenis yang digunakan untuk kendaraan	10,560,891	ST
15	2501004900	Garam lainnya yang mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7%	10,047,980	NT-1
16	8428909000	Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya	9,786,854	NT-1
17	7801910000	Timbal tidak ditempa, mengandung antimoni sebagai elemen lainnya	9,411,588	ST
18	7801100000	Timbal dimurnikan	9,188,720	ST
19	8445201000	Mesin pemintal benang tekstil, dioperasikan secara elektrik	7,764,718	NT-1
20	0703101900	Bawang bombay, segar atau dingin	6,910,108	EL

Keterangan : NT-1 = *Normal Track 1* ; ST = *Sensitive Track* ; EL = *Exclusion List*
 NT-2 = *Normal Track 2* ; HSL = *High Sensitive List*

Catatan : Dua puluh produk prioritas impor Indonesia dari India berdasarkan produk yang mengalami kenaikan impor sesudah pemberlakuan AFTA (urutan berdasarkan kenaikan tertinggi hingga terendah)

Produk ekspor Indonesia ke India yang memiliki nilai kenaikan relatif tinggi sebelum dan sesudah pemberlakuan AFTA didominasi oleh produk yang tergolong bahan baku atau bahan mentah

diantaranya *Crude Palm Oil (CPO)*, bijih tembaga, karet alam, gambir, pulp dan kayu. Selain bahan baku, produk lain yang diekspor ke India yang relatif tinggi merupakan jenis produk

kimia dan petrokimia diantaranya benzena, p-silena, pupuk, resin, ester dari asam akrilik dan asam laurat, asam miristat, garam dan esternya (Tabel 1).

Produk impor Indonesia dari India yang mengalami kenaikan relatif besar sebelum dan sesudah pemberlakuan AIFTA adalah bahan baku tekstil dan produk pertanian yaitu kapas, kacang tanah, gula tebu, jagung, tembakau, dan bawang bombay (Tabel 2). Produk lain yang cukup tinggi kenaikannya adalah produk kimia dan permesinan yaitu p-silena, o-silena, Buta-1,3-diena dan isoprena, Polipropilena, dan Etilena glikol (ethanadiol). Untuk mesin yaitu

mesin piston, mesin pengangkat dan mesin pemintal.

Tariff schedule pada ekspor 90% produk yang termasuk dalam produk prioritas masuk ke dalam golongan tarif NT-1, pada akhir tahun 2013 tarif bea masuknya akan menjadi nol. Impor 50% produk yang termasuk dalam produk prioritas masuk ke dalam golongan tariff NT-1, 20% masuk tarif ST, dan masing-masing 15% untuk HSL dan EL (Tabel 1).

Menurut jenis produknya, 20 produk prioritas ekspor dan impor dalam rangka AIFTA terdiri atas 11 jenis produk besar (Tabel 3).

Tabel 3 Ketersediaan SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk.

No	Jenis Produk	Produk	Tarif Schedule	Ketersediaan SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk		
1	Karet dan Produk Karet	TSNR 20	NT-1	ABC		
		RSS Grade 1	NT-1	ABC		
2	Kehutanan	Pulp kayu kimia dari pohon bukan jenis konifera	NT-1	ABC		
		Kayu (untuk lantai papan) dari pohon bukan jenis konifera selain bamboo	NT-1	A		
3	Kimia dan Petrokimia	Gambir	NT-1	A		
		Benzena	NT-1	-		
		p=Silena	NT-1	AB		
		Pupuk mineral atau kimia lainnya mengandung nitrat dan fosfat	NT-1	ABC		
		Ester dari asam akrilik	NT-1	-		
		Urea dalam larutan air maupun tidak	NT-1	ABC		
		Asam rosin dan asam damar (resin)	NT-1	A		
		Asam laurat, asam miristat, garam dan esternya	NT-1	-		
		Buta-1,3-diena dan isoprena	NT-1	-		
		O-silena	NT-1	AB		
4	Farmasi	Polipropilena dalam bentuk granul (butiran)	HSL	AC		
		Etilena glikol (ethanadiol)	NT-1	A		
		Tetanus toxoid	NT-1	-		
		5	Elektronika	Tabung gambar televisi sinar katoda	NT-1	A
		6	Baja dan Produk Baja	Produk canai lantainya dari baja stainless	NT-1	-
		7	Garam	Garam lainnya yang mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7%	NT-1	AB
		8	Permesinan	Mesin penempa (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu (elektrik)	NT-1	A
				Mesin piston bolak-balik dari jenis yang digunakan untuk kendaraan	ST	-
Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya	NT-1			A		
9	Tekstil dan Produk Tekstil	Mesin pemintal benang tekstil, dioperasikan secara elektrik	NT-1	A		
		Kain tenunan dari serat stapel sintetik (selain poliester)	ST	ABC		
		Serat stapel tiruan, untuk dipintal dari rayon viskosa	NT-2	AC		
		Serat stapel sintetik, untuk dipintal dari poliester	ST	A		
10	Logam dan Bijih Logam	Kapas, tidak digaruk atau disisir	NT-1	AB		
		Bijih tembaga dan konsentratnya	NT-1	-		
		Timbal tidak ditempa, mengandung antimoni	ST	AB		
		Timbal dimurnikan	ST	AB		

11	Pertanian dan Perkebunan	Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain,berkulit,	HSL	AB
		Gula tebu, dengan warna larutan (ICUMSA) minimal 1200	EL	AB
		Jagung, selain benih dan jagung brondong	EL	AB
		Kacang tanah dikuliti, pecah maupun tidak	HSL	AB
		Tembakau jenis Virginia, diolah dengan udara panas	NT-1	ABC
		Bawang bombay, segar atau dingin	EL	B
		Minyak kelapa sawit mentah (CPO)	NT-1	ABC
		Minyak kernel kelapa sawit atau babassu mentah	NT-1	B

Keterangan :

A = Tersedia SNI ; AB = Tersedia SNI dan laboratorium uji

B = Tersedia laboratorium uji ; AC = Tersedia SNI dan lembaga sertifikasi produk

C = Tersedia lembaga sertifikasi produk ; ABC = Tersedia SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk

- = Tidak tersedia SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk

Kode *tariff schedule* sama dengan pada Tabel 2

Jenis produk yang paling banyak diperdagangkan adalah produk kimia dan petrokimia salah satunya adalah p-silena. Produk p-silena masuk ke dalam 20 produk prioritas untuk ekspor dan impor. Namun produk p-silena Indonesia mengalami defisit nilai perdagangan dengan India. Selisih nilai perdagangan ekspor dan impor dengan negara India untuk p-silena adalah US\$ -34.782.666 dimana produk p-silena yang diekspor ke India lebih rendah dibandingkan dengan produk p-silena yang diimpor dari India. Hal ini menunjukkan bahwa produksi p-silena lokal belum mencukupi kebutuhan di Indonesia, sehingga konsumen harus mengimpor cukup banyak khususnya dari India. Peningkatan produktivitas diperlukan untuk menurunkan nilai impor sehingga konsumen dapat menggunakan produk lokal.

AFTA merupakan suatu fasilitas yang diberikan dalam melakukan perdagangan ekspor dan impor ke dan dari negara India. Keuntungan yang diberikan adalah penurunan bahkan penghapusan bea masuk. Dalam perjanjian AFTA terdapat suatu *tariff schedule* bea masuk yang diberlakukan terhadap suatu produk berdasarkan nomor HS nya. Terhadap 20 produk prioritas ekspor dan impor, sebesar 69,23% produk tersebut masuk ke dalam kategori NT-1 (Tabel 4) yang artinya untuk negara Indonesia pada akhir tahun 2013 bea masuk untuk produk yang masuk dalam kategori NT-1 adalah bebas (nol bea masuk) yang artinya memungkinkan produk yang masuk ke Indonesia dari India akan semakin banyak karena produk yang masuk kategori NT-1 tidak dikenakan bea masuk (bebas). Di lain sisi pula, produk dari Indonesia yang diekspor ke India juga semakin mudah.

Tabel 4 *Tariff schedule* 20 produk prioritas.

Tariff Schedule	Jumlah	Persentase (%)
Normal track1 (NT-1)	27	69.23
Normal Track 2 (NT-2)	1	2.56
Sensitive Track (ST)	5	12.82
High Sensitive List (HSL)	3	7.69
Exclusion List (EL)	3	7.69

Pembebasan bea masuk akibat dari AFTA menimbulkan peluang masuknya produk-produk sub standar khususnya dari India ke Indonesia. Mengantisipasi hal tersebut, standar dan penilaian kesesuaian merupakan faktor penting dan dapat dijadikan sebagai alat *filter* terhadap produk-produk yang masuk ke Indonesia. Selain itu, standar dan penilaian kesesuaian juga mampu menjadi alat pendukung daya saing produk Indonesia di tingkat internasional.

Hasil identifikasi kesiapan Indonesia ditinjau dari ketersediaan SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk dalam menghadapi AFTA dapat dilihat pada Tabel 5. Sebanyak 20,51% dari 20 produk prioritas ekspor dan impor telah memiliki standar, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur mutu untuk mendukung produk komoditi ekspor dan impor tersebut telah siap dalam menghadapi AFTA. Produk tersebut diantaranya karet *Technically Specified Natural Rubber* (TSNR) 20, karet *Rubber Smoked Sheets* (RSS) grade 1, pulp (dari kayu bukan jenis konifera), kain tenun dari serat stapel sintetik, pupuk (mengandung nitrat dan fosfat), urea, tembakau (virginia) dan CPO. Dilihat dari jenisnya, ke-8 produk yang dikategorikan siap tersebut sebagian besar

merupakan produk yang tergolong bahan baku dan merupakan hasil perkebunan.

Tabel 5 Ketersediaan SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk terhadap 20 sektor prioritas ekspor dan impor.

Ketersediaan SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk	Jumlah	Persentase (%)
Tersedia SNI	9	23.08
Tersedia laboratorium uji	2	5.13
Tersedia lembaga sertifikasi produk	0	0.00
Tersedia SNI dan laboratorium uji	10	25.64
Tersedia SNI dan lembaga sertifikasi produk	2	5.13
Tersedia laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk	0	0.00
Tersedia SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk	8	20.51
Tidak tersedia SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk	8	20.51

Keterangan :

- List SNI untuk 20 produk prioritas ekspor lihat Lampiran 1
- List SNI untuk 20 produk prioritas impor lihat Lampiran 2
- List laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk untuk 20 produk prioritas ekspor lihat Lampiran 3
- List laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk untuk 20 produk prioritas impor lihat Lampiran 4

Terkait dengan ketersediaan SNI, laboratorium uji dan lembaga penilaian kesesuaian yang paling besar adalah produk prioritas tersebut memiliki standar dan laboratorium uji, namun tidak memiliki lembaga sertifikasi produk (Tabel 5). Produk tersebut diantaranya timbal tidak ditempa, timbal dimurnikan, kapas, p-silena, o-silena, kacang tanah, gula tebu, jagung dan garam. Produk dalam kategori ini tidak memiliki lembaga sertifikasi produk antara lain karena produk tersebut masih belum termasuk kategori SNI wajib. Namun untuk menjaga kualitas dalam perdagangan, produk tersebut memiliki

laboratorium uji yang dapat menguji dan menentukan kualitas produk tersebut.

Sebanyak 23,08% produk, baru memiliki SNI tanpa memiliki laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk (Tabel 5). Produk tersebut diantaranya mesin tempa, mesin pengangkat, mesin pemintal, kayu (bukan jenis konifera), gambir, serat stapel sintetik, asam resin (rosin), etilena glikol dan tabung televisi. Dilihat dari jenis produknya, permasalahan dalam penyediaan laboratorium uji dan lembaga sertifikasi adalah dalam hal infrastruktur yang memakan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah dalam hal ini. Hal itu dilakukan agar produk dapat terjaga kualitasnya.

Produk yang hanya memiliki laboratorium uji tanpa memiliki SNI dan lembaga sertifikasi produk menggunakan standar lain dalam menentukan kualitas produk dan cara pengujian, sedangkan untuk produk yang memiliki standar dan lembaga sertifikasi produk biasanya menggunakan laboratorium uji dari luar negeri yang diakui oleh lembaga sertifikasi di Indonesia. Suatu lembaga sertifikasi produk tidak akan ada tanpa adanya SNI, hal itu dikarenakan ruang lingkup dari produk yang disertifikasi di Indonesia adalah berdasarkan dari SNI, jadi tanpa adanya SNI suatu lembaga sertifikasi produk tidak akan memiliki ruang lingkup untuk produk tersebut.

Produk yang perlu mendapat perhatian khusus adalah produk prioritas yang tidak memiliki SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk. Dari 20 produk prioritas ekspor dan impor terdapat sebanyak 20,51%. Produk tersebut diantaranya bijih tembaga, mesin piston, tetanus toxoid, benzene, asam laurat dan asam miristat (beserta esternya), Buta-1,3-diena dan isoprene, dan produk canai lantainan baja stainless. Sebesar 75% produk yang tidak memiliki SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk termasuk dalam kelompok NT-1. Pada akhir tahun 2013 bea masuk akan menjadi nol. Hal tersebut merupakan situasi yang sangat mendesak terkait daya saing produk dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini penyediaan SNI, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi sangat dibutuhkan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan standar adalah dengan membuat dan merumuskan standar sendiri berdasarkan dari hasil penelitian dan pengembangan. Selain itu dapat dilakukan pula dengan cara mereferensi standar internasional yang berlaku untuk diadopsi secara indentik atau mereferensi suatu standar internasional dengan memperhatikan kondisi dalam negeri (modifikasi standar internasional).

5. KESIMPULAN

Dalam menghadapi AIFTA kesiapan Indonesia ditinjau dari ketersediaan SNI dan lembaga penilaian kesesuaian dari 20 produk prioritas ekspor dan impor adalah sebesar 20,51%. Sebanyak 53,85% memiliki kemampuan untuk dipersiapkan dalam waktu cepat karena beberapa infrastrukturnya telah tersedia. Untuk produk yang belum memiliki standar, laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk, perlu dikembangkan standar melalui kegiatan penelitian atau merferensi dari standar internasional yang berlaku serta menambah ruang lingkup bagi laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk untuk dapat menilai kesesuaian dari kualitas produk tersebut.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tri Muji Ermayanti atas bimbingan dan masukannya kepada penulis selama penyusunan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Maharani, K. (2013). *Pengaruh ASEAN-India Free Trade Area Terhadap Industri CPO India*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- ASEAN. (2009). *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India*.
- Badan Standardisasi Nasional. (2010). *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*. BSN : Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 2009. *Pengantar Standardisasi*. BSN : Jakarta.
- Francis, S. (2011). The ASEAN-India Free Trade Agreement: A sectoral impact analysis of increased trade integration in goods. *Economic and Political Weekly*. Vol. 46 No. 02.
- Fukuchi, A. (2009). Free Trade Agreements in Asia : A Progress Report. *Economic Review*. Vol.4 No. 6. Tokyo.
- International Organization for Standardization. (2004). *ISO/IEC Guide 2004:2008, Standardization and Related Activities – General Vocabulary*. Eight Edition. Geneva. Switzerland.
- Lembaga Pertahanan Nasional. (2012). *Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia guna menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dalam rangka memperkuat ketahanan nasional*. *Jurnal Kajian Lemhanas RI* . Edisi 14. Hal.42.
- Porter, M. E. (2009). *Improving Indonesia's Competitiveness*. Presentation to President Susilo Bambang Yudhoyono. Boston. HarvardBusinessSchool.
- Salvatore, D. (2007). *International Economics*. Wiley. United States.
- United Nations Commodity Trade Statistics (UN comtrade). (2013) Database.2013. <http://comtrade.un.org>. diakses pada tanggal 25 september 2013.
- Winantyo, R., et al. (2008). *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: memperkuat sinergi ASEAN di tengah kompetisi global*. Elex Media Komputindo. Jakarta.